



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
TAHUN 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAP;KIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 telah diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kecamatan Pelaihari untuk masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Pelaihari, Januari 2022

CAMAT PELAIHARI,

DWI ANGGRANI, S.STP
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. ISU STRATEGIS	17
D. PRODUK LAYANAN.....	19
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. VISI RPJMD	22
B. MISI RPJMD	24
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	29
E. PERJANJIAN KINERJA.....	30
F. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	46
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	93
BAB IV PENUTUP.....	98
A. SIMPULAN	98
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	98



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	14
Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari	15
Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari	15
Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	16
Tabel 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari	18
Tabel 6. Sasaran strategis Kantor Kecamatan Pelaihari	25
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari	27
Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2019-2023.....	29
Tabel 9. Kinerja pelayanan Kecamatan Pelaihari.....	29
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021.....	30
Tabel 11. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Pelaihari	33
Tabel 12. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021	37
Tabel 13. Perbandingan Sasaran Strategis Sesuai Renstra Berdasarkan Tabel Target Dan Realisasi Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.....	43
Tabel 14. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.....	45
Tabel 15. Pengelompokan Capaian Kinerja.....	47
Tabel 16. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.....	48



Tabel 17	Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021.....	50
Tabel 18	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2021	51
Tabel 19	Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari	53
Tabel 20	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KecamatanPelaihari Tahun 2021	54
Tabel 21	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KecamatanPelaihari Tahun 2018-2020.....	54
Tabel 22	Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari TahunAnggaran 2021.....	56
Tabel 23	Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian SekretariatKecamatan Pelaihari.....	58
Tabel 24	Realisasi, Target, Realisasi dan Persentase Capaian IndikatorKinerjaSekretariatKecamatan Pelaihari	58
Tabel 25	Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 berdasarkanKomponen penilaian.....	59
Tabel 26	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2021.....	60
Tabel 27	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2021.....	61
Tabel 28	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2021	65
Tabel 29	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2021	68
Tabel 30	Jenis Bantuan Sosial dan Jumlah Penerima Bantuan KecamatanPelaihari TA. 2021.....	70
Tabel 31	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2021	72
Tabel 32	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2021	76
Tabel 33	Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021	78
Tabel 34	Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2021	80



Tabel 35	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2021	83
Tabel 36	Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2020-2021	86
Tabel 37	Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pelaihari	89
Tabel 38	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor KecamatanPelaihari Tahun Anggaran 2021	93
Tabel 39	Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi KantorKecamatan Pelaihari.....	93
Tabel 40	Realisasi Persentase Keuangan, Fisik dan Efisiensi SasaranStrategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2021	94
Tabel 41	Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2020-2021	94
Tabel 42	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2020-2021	97



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari3
Gambar 2.	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Tahun 2021 bagi Kepala Desa, Kasi Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat Kecamatan Pelaihari.....62
Gambar 3.	Penyuluhan Sosialisasi Hukum Pertanahan Tahun 2021 bagi kepala Desa, Lurah, Kasi Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat Se Kecamatan Pelaihari62
Gambar 4.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelaihari.....66
Gambar 5.	Musrenbang Desa Atu-Atu di Kecamatan Pelaihari66
Gambar 6.	Pelaksanaan Evaluasi APBDes Kampung Baru di Kecamatan Pelaihari.....67
Gambar 7.	Kafilah MTQKecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat KabupatenTanah Laut Tahun 2021di Kecamatan Takisung69
Gambar 8.	Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari yang mendapat hadiah juara di MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 202170
Gambar 9.	Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut denganMasyarakat Desa Pemuda pada Kecamatan Pelaihari Tahun 202170
Gambar 10	Rapat Koordinasi Sosialisasi Pelaksanaan PenatausahaanPertanggungjawaban serta Pelaporan Dana Hibah pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021.....71
Gambar 11	Kegiatan Organisasi Masyarakat yang menggunakan dana hibah Kecamatan Pelaihari72
Gambar 12	Operasi Gabungan Penerapan Protokol Kesehatan di Kelurahan Pabahanan73
Gambar 13	Rapat Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman danKetertiban Kecamatan Pelaihari74
Gambar 14	Rapat Musyawarah Desa tentang Pendistribusian LPG 3 Kg74
Gambar 15	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.....78



Gambar 16	Kegiatan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelaihari Tahun 2021.....	79
Gambar 17	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pelaihari.....	80
Gambar 18	Pembelian Kursi Rapat pada Kecamatan Pelaihari	81
Gambar 19	Pembelian AC Ruang Aula Pertemuan Kecamatan Pelaihari	81
Gambar 20	Pemasangan Backdrop Aula Pertemuan Kecamatan Pelaihari.....	81
Gambar 21	Asistensi DPA Perubahan 2021 Kecamatan Pelaihari dengan TimTAPD di Aula BPKAD Kab. Tanah Laut.....	83
Gambar 22	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA Perubahan SKPD Tahun 2021 di Aula Rapat BPKAD Kab. Tanah Laut.....	83
Gambar 23	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD Tahun 2022 di Aula Rapat BPKAD Kab. Tanah Laut.....	84
Gambar 24	Dokumen DPA APBD dan DPA APBD Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2021	84
Gambar 25	Dokumen Renja SKPD Tahun 2022 dan Dokumen LKPJ-LPPDKecamatan Pelaihari Tahun 2021	84
Gambar 26	Dokumen Lapkin Kecamatan Pelaihari Tahun 2020	85



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2021	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 merupakan wujud dari pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 didasari atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Kecamatan Pelaihari dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

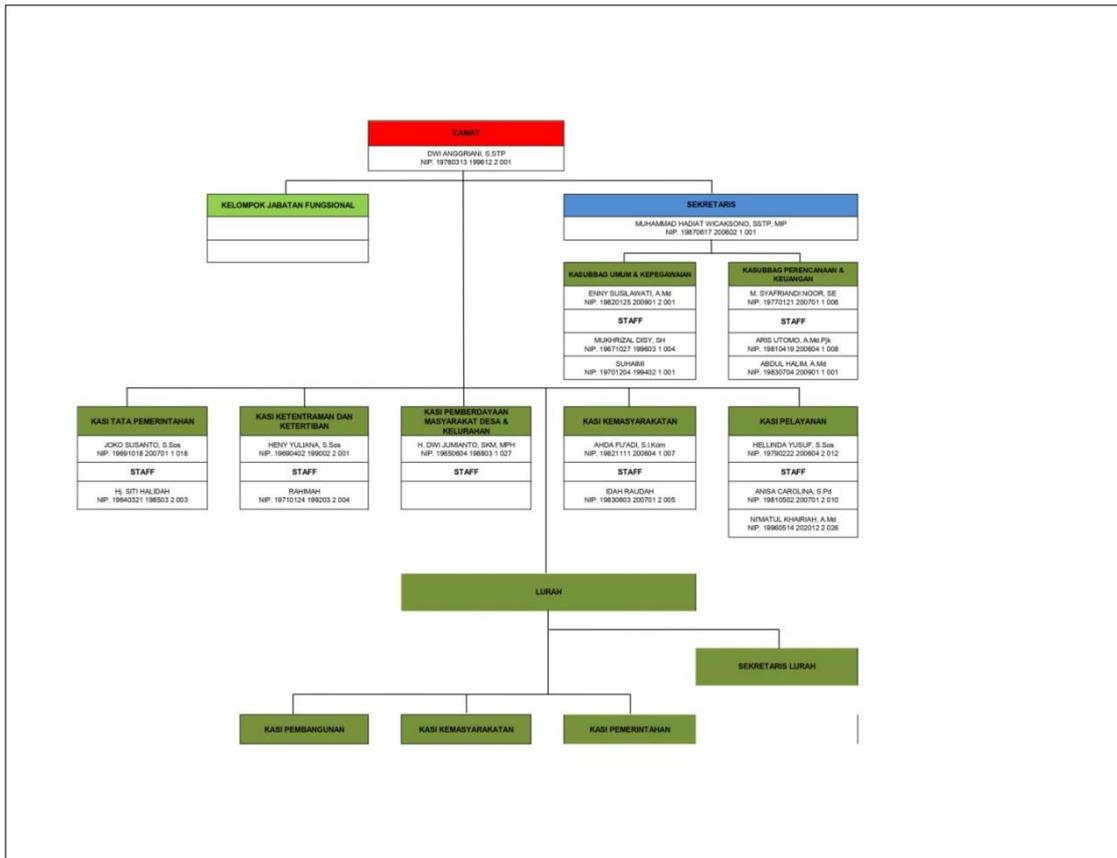
Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Seksi Pelayanan
- 8) Kelompok jabatan fungsional
- 9) Kelurahan



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilihat dilihat pada Gambar.1 dibawah ini :



Gambar. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi pada kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator



penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Pelaihari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Pelaihari dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;



- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Pelaihari dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;



- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :



- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya



2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- n. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- o. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses suratijin penutupanjalantertentu, ijin parkir tidak tetap,surat jalan dan surat keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoranuntuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1) Penanggulangan bencana.
 - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.



- 3) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 - 4) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat
 - 5) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
 - o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
 - q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;



- c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan
- i. retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- k. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;



- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan social terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;



- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Pelaihari didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari 18 (delapan belas) orang PNS dan 8 (delapan) orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Camat	III.a	1		1
2.	Sekretaris	III.b	1		1
3.	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	4	6
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
4.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				



7.	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
8.	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	3	5
JUMLAH			18	8	26

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor Kecamatan Pelaihari untuk golongan IV sebanyak 3(tiga) orang, Golongan III sebanyak 11 (sebelas) orang, golongan II sebanyak 4(empat) orang dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

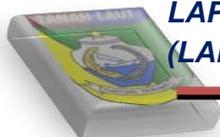
Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	1
5.	Pembina	IV/a	2
		JUMLAH	3
6.	Penata Tk.I	III/d	5
7.	Penata	III/c	-
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	6
9.	Penata Muda	III/a	
		JUMLAH	11
10.	Pengatur Tk.I	II/d	3
11.	Pengatur	II/c	1
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
		JUMLAH	4
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
16.	Juru Muda	I/a	-
		JUMLAH	-
		JUMLAH TOTAL	18

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Pelaihari untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 0 (nol) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 4(empat) orang, Jenjang D3 sebanyak 4 (empat) orang, jenjang S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	4	4	8



4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	4	2	6
7.	D.4	-	-	-
8.	Sarjana (S-1)	8	2	10
9.	Pasca sarjana/Master (S-2)	2	-	2
-	Doktor (S-3)	-	-	-
JUMLAH		18	8	26

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Kecamatan Pelaihari didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa air	1	1		
2.	Mini bus	2	2		
3.	Sepeda motor	4	4		
4.	Termometer standar	1		1	
5.	Lemari besi	10	7	3	
6.	Lemari kayu	4		4	
7.	Rak besi	3	3		
8.	Rak kayu	2			
9.	Filing cabinet besi	9	8	1	
10.	Lemari makan	1			1
11.	CCTV	2	2		
12.	Papan visual / papan nama	1	1		
13.	Alat penghancur kertas	1		1	
14.	Papan pengumuman	1	1		
15.	Meja kerja kayu	30	18	12	
16.	Meja rapat	20	20		
17.	Kursi tamu	3	3		
18.	Kursi biasa	19	14	2	3
19.	Bangku tunggu	4	2	2	
20.	Sofa	5	4	1	
21.	Mesin pemotong rumput	1		1	
22.	Lemari es	2	2		
23.	AC split	15	15		
24.	Kipas angin	8	7	1	
25.	Televisi	2	1	1	
26.	Loudspeaker	2	1		
27.	Sound sistem	2	1		
28.	Stabilisator	1	1		
29.	Camera vidio	1	1		
30.	Handy cam	1	1		
31.	Karpet	4	4		
32.	Tangga	1	1		
33.	Audio mixing stationer	1	1		



34.	Audio monitor active	1	1		
35.	Audio visual	1	1		
36.	Microphone/wireless MIC	1	1		
37.	Power amplifier	3	1		
38.	Camera elektronik	1		1	
39.	Layar film/proyektor	3	2	1	
40.	Alat studio pemetaan lainnya	2	2		
41.	Genset	1	1		
42.	Uninterrupted power supply (UPS)	4	1		3
43.	PC unit	8	8		
44.	Lap top	11	10	1	
45.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	13		3
46.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
47.	Kursi lipat	67	67		

C. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;



- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
 f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linms yang belum sesuai
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	
2.	Pemberdayaan dan penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan Kecamatan
		Belum optimalnya Penyusunan APBDesa	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
Belum semua desa yang administrasi pengelola keuangannya baik			
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya peayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Jumlah personil di Kecamatan Pelaihari masih kurang	Belum terisinya semua jabatan fungsional umum sesuai standar SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, tersedia hanya 18 orang
		Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparaturnya pelayanan publik	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
		Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pelaihari masih kurang memadai peralatan penunjang gedung kantor	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut. :

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;



3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Kecamatan Pelaihari menerbitkan beberapa produk layanan yang didasari oleh:

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun jenis layanan tersebut terdiri dari:

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial (ada perubahan regulasi, IMB tidak dapat dipungut karena ada SE Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ Tahun 2021 Tentang PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA,



PENYELENGGARAAN LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PERSUTUJUAN BANGUNAN GEDUNG SERTA RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

2. Izin Usaha Mikro dan Kecil
3. Izin Bilyard Non Komersial
4. Izin Playstation/Video Game

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2021 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

- BAB I Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
- A. Latar Belakang
 - B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
 - C. Isu Strategis
 - D. Produk dan Layanan
 - E. Sistematika Penyajian
- BAB II Perencanaan dan penetapan kinerja, menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- A. Visi RPJMD
 - B. Misi RPJMD
 - C. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - D. Indikator Kinerja Utama
 - E. Perjanjian Kinerja
 - F. Program dan Kegiatan
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon III.a (Kepala Kantor/Camat)
 - a) Eselon IV.a (Kepala Seksi)
 3. Eselon III.b (Sekretaris Camat)



a) Eselon IV.b (Kepala Sub Bagian)

B. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja

1. Anggaran dan realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program
3. Perbandingan program dan kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Cascading/Pohon Kinerja
3. Matrik Keselarasan Renstra
4. Matrik Keselarasan SKPD



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

INOVASI

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa



terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA

Aspek administrasi dan aspek substansi di atur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

RELIGIUS

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas sebagai sarana membangun produktivitas aparatur daerah dan kehidupan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkatdaerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani yaitu masyarakat di daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah "**DESA DIBINA, KOTA DITATA**". Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah "**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**".



Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus "DESA DIBINA, KOTA DITATA" melalui "KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS". Fokus pada lokus "DESA DIBINA, KOTA DITATA" adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

B. MISI RPJMD

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan "**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**", maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA	: Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut
INOVASI	: Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
TERTATA	: Diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
RELIGIUS	: Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
AKTUAL DAN SINERGI	: Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung, Misi ke-1, Misi ke-3, dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yaitu bertepatan dengan tahun ke **tiga** tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 pada pembahasan selanjutnya.



Misi I : meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**), dengan indikator Nilai SAKIP, Nilai RB.

Misi4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Pelaihari beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023. Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan beragama di masyarakat.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pelaihari adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Sasaran strategis Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	83
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	75
3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %



Pernyataan tujuan Kecamatan Pelaihari diatas mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Pelaihari handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Pelaihari menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Pelaihari, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk Kecamatan Pelaihari harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator-indikator beserta target-targetnya pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Adapun Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2019 – 2023 (target 5 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2019-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	IKM	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70	72	73	74	75
2.	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan keuangan yang tertib	100 %	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Pelaihari menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Kinerja pelayanan Kecamatan Pelaihari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey (73)	Semua kasi di kecamatan
2.	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif, efisien	a. Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	%	Kasubbag Umpeg
		b. Nilai SAKIP	BB	Kasubbag Perenc. dan Keuangan



Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi Kecamatan Pelaihari Nomor 1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi pengukuran terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dengan penanggung jawab Seksi Pelayanan, Seksi PMD/K, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Kemasyarakatan. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran untuk Nomor 2 Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif, efisien yaitu persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib dengan penanggung jawab yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian serta Subbag Perencanaan dan Keuangan.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 yang telah disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Camat : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	73%	6 program/ 10 kegiatan / 27 sub Kegiatan	Rp. 11.603.760.703,-



<p>Kasi Tata Pemerintahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD 2. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD 3. Monitoring Penyusunan Laporan kependudukan 4. Penyusunan Laporan LPPD dan LKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik 2. Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Peilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD 3. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat 4. Jumlah desa yang menyampaikan LPPD dan LKPD tepat waktu 	<p>15 Desa</p> <p>15 Desa</p> <p>15Desa</p> <p>15 Desa</p>	<p>2 program / 2 kegiatan /</p>	<p>Rp. 15.206.600,-</p>
<p>Kasi PMD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi 2. Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat 3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa 4. Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersial 5. Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelompok masyarakat yang bisa memasarkan hasil produksinya 2. Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik 4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP 5. Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 	<p>5 kelompok</p> <p>5 Kelurahan / 15 Desa</p> <p>15 Desa</p> <p>33 Dokumen</p> <p>1 Kegiatan</p>	<p>2 Program / 2 Kegiatan / 4 Sub Kegiatan</p>	<p>Rp. 122.520.301,-</p>
<p>Kasi Kemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang Kemasyarakatan 2. Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan olahraga di tingkat kecamatan 3. Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hibah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidangkemasyarakatan 2. Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP 3. Jumlah masyarakat tidak mampu yang telah di fasilitasi penyaluran bantuan sosial 	<p>15 dokumen hibah</p> <p>2 kegiatan</p> <p>1500 orang</p>	<p>1program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan</p>	<p>Rp. 1.200.962.865,-</p>
<p>Kasi Trantib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban 3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan 4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi 2. Jumlah kelompok masyarakat di bidangketentraman dan ketertiban yang aktif 3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring 4. Jumlah sosialisasi penanganan gangguan 	<p>1 kejadian</p> <p>2 kelompok</p> <p>3 kejadian</p> <p>1 kegiatan</p>	<p>1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan</p>	<p>Rp. 30.480.000,-</p>



ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	ketentraman dan ketertiban masyarakat yang di monitoring			
Kasi Pelayanan : 1. Memberikan pelayanan administasi terpadu kecamatan 2. Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat 3. Menyusun Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP 2. Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi 3. Jumlah data informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	15 jenis pelayanan 4 pengaduan 1 dokumen	1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. 7.940.000,-
Sekcam : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan 2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	80 100 %	1 Program / 5 Kegiatan / 18 sub kegiatan	Rp. 10.221.482.557,-
Kasubbag Umpeg : 1. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran 2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor 3. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik 3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	100 % 227 Unit 17 dokumen	1 program / 3 kegiatan / 11 sub kegiatan	Rp. 641.390.986,-
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : 1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan 2. Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang di susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang di susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 dokumen 4 dokumen	1 program / 2 kegiatan / 7 sub kegiatan	Rp. 9.580.081.571,-

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2021 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2021 itulah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun 2021. Untuk menggambarkan Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan beserta target-targetnya serta keselarasan dengan Renstra SKPD dan juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilingkungan Kecamatan Pelaihari dapat disajikan sebagaimana tabel berikut dibawah ini:



Tabel 11. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Pelaihari

No	SASARAN STRATEGIS	IK SARGIS	TARGET		PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	No		KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN	
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM				URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		(Rp)	
																TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	100%	1	Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	Nilai IKM	Baik	Ya	1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	15 desa dan 5 kelurahan dan aparat terkait	Jumlah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Pelaihari	Ya	30.480.000	terkait	
			0	2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai IKM	Baik	Ya	2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan keutuhan Negara Kesatuan Republik	Masyarakat, ASN, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan, instansi vertikal lainnya	Jumlah terlaksananya penyuluhan pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional	Ya	8.047.000	terkait	
				3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Aparatur pada 15 desa dan 5 Kelurahan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi pemerintahan desa	Ya	7.157.300	terkait	
				4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kafilah Kecamatan Pelaihari, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	a. Jumlah buka bersama safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat b. Jumlah organisasi masyarakat penerima hibah c. Jumlah terkirimnya kafilah/official dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kab.		1.200.962.865	terkait	

				5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Aparat Desa dan Kelurahan, serta aparat terkait	Jumlah terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		25.549.900	terkait
				6		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Aparat Desa, Aparat Desa 15 Desa dan 5 Kelurahan	Jumlah terlaksananya pameran pembangunan hasil produksi masyarakat	Ya	42.535.751	terkait
				7		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan di Wilayah	Masyarakat, apararat desa, organisasi kewanitaan	Jumlah terlaksananya kegiatan Lomba Hari Jadi Kab. Tanah Laut	Ya	40.954.700	terkait
				8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Aparatur pada 15 desa dan 5 Kelurahan	Jumlah terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan	Ya	13.439.900	terkait
				9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di	ASN Kecamatan, Aparat Desa	Jumlah dokumen IKM	Ya	13.149.800	terkait
2	Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran Kecamatan Pelaihari Yang Akuntabel	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian		10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Ya	2.614.590	terkait
				11		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Ya	67.656.930	terkait
				12		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah penyediaan BBM kendaraan dinas	Ya	18.142.400	terkait
				13		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah penyediaan barang cetakan dan	Ya	7.152.400	terkait
				14		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Pelaihari	a. Jumlah Penyediaan makanan dan minuman b. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan	Ya	107.972.000	terkait

				15		Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Tenaga PTT yang dibayar	Ya	70.803.328	terkait
				16		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ya	36.050.000	terkait
				17		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Ya	19.040.890	terkait
				18		Nilai IKM	Baik	Ya			Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	a. Jumlah belanja jasa jaminan barang milik daerah b. Jumlah pembelian alat pembersih dan bahan pembersih	Ya	138.604.118	terkait
				19		Nilai IKM	Baik	Ya		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Pelaihari	a. Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 b. Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional al roda 2 dan 4	Ya	32.326.460	terkait
				20							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Ya	4.450.000	terkait
				21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Baik	Ya		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen Renja APBD Murni, Renja APBD Perubahan, Dokumen	Ya	800.000	terkait
				22				Ya			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen DPA SKPD	Ya	1.200.000	terkait
				23				Ya			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	Ya	1.200.000	terkait
				24				Ya			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan capaian kinerja	Ya	1.394.000	terkait
				25				Ya		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Ya	9.518.363.619	terkait
				26				Ya			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen laporan	Ya	624.000	terkait

				27				Ya			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen laporan	Ya	56.509.952	terkait
													JUMLAH		11.603.760.073	

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2021, melaksanakan 6 Program, 10 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp).	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.221.482.557,-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 800.000,-
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp. 1.200.000,-
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.200.000,-
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp. 1.200.000,-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.518.363.619,-
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 624.000,-



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp).	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 56.509.952,-
2.	Meningkatkan tata kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian		Rp. 305.860.43,-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.614.590
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 164.472.440,-
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 22.954.000,-
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.852.400,-
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 107.967.000,-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 70.803.328,-
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Rp. 36.049.600.
					Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 49.97.050,-



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp).	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
					Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 138.604.118,-
				Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau L Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Rp. 36.326.400,-
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.450.000,-
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Penyelenggaran Publik	Rp. 13.149.800,-	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. 13.149.800,-
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 109.040.351,-	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Rp. 25.549.900,-



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp).	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
					Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 42.535.751,-
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Rp. 40.954.700,-
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 30.480.000,-	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.30.480.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.209.010.165	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp. 1.200.962.865,-



No	Sasaran Strategis				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
					Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pelstarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemerliharan keutuhan Negara Republik Indonesia	Rp, 8.047.000,-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.597.200,-	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 7.357.300,-
					Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 13.439.900
JUMLAH						Rp. 11.603.760.073,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja **ketiga** RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



Tabel 13. Perbandingan Sasaran Strategis Sesuai Renstra Berdasarkan Tabel Target Dan Realisasi Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	Ket									
					2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021				2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020		2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Misi 1 meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya aplikasi pelayanan publik yang mudah diakses	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum	90%	73,19	70%	81,81%	72%	81,90%	73%	81,92 %	1.Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan	Persentase masyarakat yang dilayani pelayanan publik pada kecamatan	%	90	73,19	67,02%	70	81,81	116%	72	81,9	95,69%	73%	81,92 %	81,92 %	Kasi Pelayanan
		Misi 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan efisien	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Meningkatkan kinerja pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pelayanan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Kasi Trantib
													3. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pemberdayaan administrasi masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembinaan dan pemberdayaan administrasi masyarakat desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Kasi	
													4. Meningkatkan kinerja pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Kasi	
		Misi 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.	2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,03%	4. Meningkatkan kinerja pelayanan pada stake holder kemasyarakatan keagamaan, sosial, kepemudaan, kesenian dan kebudayaan	Persentase terlayani stake holder yang dilayani penatusahaan hibah bidang keagamaan, kesenian dan kebudayaan, kepemudaan di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#####	91,03 %	Kasi

Tabel 14. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kiernja Utama Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN	Ket
					2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Terwujudnya aplikasi pelayanan publik yang mudah diakses	1.Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan	Persentase masyarakat yang dilayani pelayanan publik pada kecamatan	%	90	73,19	67,02%	70	81,81	116%	72	81,9	95,69%	73%	81,92 %	112,21 %	Kasi Pelayanan
2.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan efisien	2. Meningkatkan kinerja pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pelayanan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Kasi Trantib
		3. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pemberdayaan administrasi masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembinaan dan pemberdayaan administrasi masyarakat desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		Kasi PMDK
		4. Meningkatkan kinerja pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		Kasi Tapem
3.	2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama dimasyarakat	5. Meningkatkan kinerja pelayanan pada stake holder kemasyarakatan keagamaan, sosial, kepemudaan, kesenian dan kebudayaan	Persentase terlayani stake holder yang dilayani penatusahaan hibah bidang keagamaan, kesenian dan kebudayaan, kepemudaan di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,03 %	Kasi Kemasyarakatan
4.	3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP	%	90	73,19	68,28%	72	72,71	96%	75	56,64	75,39%	80	62,56 %	78,20 %	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		7. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dari gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 indikator Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 7 Sasaran Strategis dan 8 indikator sasaran yang telah ditargetkan selama kurun waktu 4 (empat) tahun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 4 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2020 ada 2 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target.

Selain itu juga disajikan rincian 7 sasaran strategis dan 8 Indikator sasaran sesuai target dan realisasi pencapaian per sasaran strategis serta perbandingan tersebut dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian per sasaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Untuk menggambarkan atas pencapaian persasaran strategis pada table yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2018-2023.

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999).

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Tabel 15. Pengelompokan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II.	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III.	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat baik
IV.	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V.	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI.	Kurang dari 50 %	Kurang

Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Kecamatan Pelaihari diatas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan asset daerah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya dilingkungan Kecamatan Pelaihari dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 16. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
					6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pelayanan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
										2. Meningkatkan kinerja pelayanan	Persentase masyarakat yang dilayani	70%	72%	73%	74%	75%	
										3. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pemberdayaan administrasi masyarakat	Persentase pembinaan dan pemberdayaan administrasi desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
										4. Meningkatkan kinerja pelayanan pada stake holder kemasyarakatan keagamaan, sosial, kepemudaan, kesenian dan kebudayaan	Persentase terlayani stake holder yang dilayani penatusahaan hibah bidang keagamaan, kesenian dan kebudayaan, kepemudaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	
										5. Meningkatkan kinerja pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	

			2. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	
										Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	

adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kantor Pelaihari 2021 terhadap target sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	73	81,92	112,21
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	80	62,56	78,20
3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 160 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi /Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2021 adalah 81,92 dari target 75, dengan nilai capaian sebesar 109,2%, berdasarkan Tabel 11. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 termasuk kategori **Baik**.

Nilai capaian IKU tahun 2021 (81,92 dari target) bila dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2020 (81,90 dari target) memang mengalami peningkatan sebesar



0,02 %, dan dari sudut realisasi IKM juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 realisasi IKM sebesar 3,276 (Mutu Pelayanan B) dari target 72, sementara pada Tahun 2021 realisasi IKM sebesar 3,277(Mutu Pelayanan B) dari target 72, ada peningkatan realisasi IKM sebesar 0,01.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 18. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3.10	8,6
2.	Prosedur	3.15	8,75
3.	Waktu Pelayanan	3.08	8,5
4.	Biaya / Tarif	4.00	11,1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.08	8,55
6.	Kompentensi Pelayanan	3.06	8,5
7.	Perilaku Pelayanan	3.07	8,5
8.	Maklumat Pelayanan	3.03	8,4
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.92	10,9

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (4,00) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan saran dan masukan (3,03). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,27 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Pelaihari pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Pelaihari menetapkan target nilai IKM sebesar 73 sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2021 diperoleh realisasi nilai IKM 81,92 (Mutu Pelayanan Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terdapat nilai IKM sebesar 8,92 dari target yang ditetapkan. Akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 realisasi IKM hanya sebesar 73,19 (Mutu Pelayanan Baik) dari target 90, sementara pada Tahun 2020 realisasi IKM sebesar 81,90 (Mutu Pelayanan B) dari target 72, ada realisasi IKM dari 73,19 menjadi 81,92 sebesar 8,71 dibandingkan dengan tahun 2018.



Kendala permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pelaihari dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah sebagai berikut :

1. Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat.
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan prima bagi masyarakat.

Adapun upaya/solusi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur (SOP) dalam hal pengaduan, saran dan masukan dengan membuat banner/spanduk yang berisi tata cara alur dan mekanisme pengurusan perizinan/surat keterangan di Kecamatan Pelaihari.
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait (Diskominfo) untuk pembuatan sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.
3. Membuka kanal pengaduan, saran, dan masukan melalui media sosial yang sedang populer dikalangan masyarakat usia produktif.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kotak pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk bahan evaluasi dan monitoring bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan membangun sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.
3. Membuat akun resmi Instagram Kecamatan Pelaihari dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat maupun sebagai laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari sehingga kinerja Kecamatan Pelaihari dapat diketahui oleh masyarakat.

Selain itu diharapkan kerjasama dengan para stake holder terkait untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar pelayanan di kecamatan pelaihari sesuai dengan harapan masyarakat.

1. Sasaran RPJMD

Pada Tahun 2021 (Tahun Ke-3) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Pelaihari menetapkan 2(dua) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan Tujuan kedua **Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien**. Di Kecamatan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator**



tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.

Aktual bagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing.

Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Adapun tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sesuai dengan Visi “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)” dan Misi “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya” dituangkan dalam tabel 19 berikut :

Tabel 19. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait 2. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi 3. Memberdayakan aparat kecamatan Desa/Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi yang intensif 2. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat-diklat 3. Memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal/non formal 4. Melakukan seara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran



2. Eselon III (Camat)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 mencapai 81,92 % dari target sebesar 73 % dengan point realisasi IKM 81,92. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada dikecamatan	73	81,92	112,21

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan Pelaihari dari tahun 2018-2021 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 21. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian									
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90	73,19	81,32	70	81,81	116,87	72	81,90	113,75	73	81,92	112,21

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target:

Pencapaian realisasi dari target Tahun 2021 sebesar 81,92 % dan dibandingkan dengan target realisasi 2020 (72) maka pencapaian target 2021 mencapai 109,22%. Selain terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2020 ke 2021, persentase capaian juga meningkat. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Pelaihari. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

- Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu 81,90 % menjadi 81,92 %.
- Realisasi kinerja Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 sebesar **112,21%** dibandingkan tahun 2020 sebesar **113,75 %** terjadi kenaikan

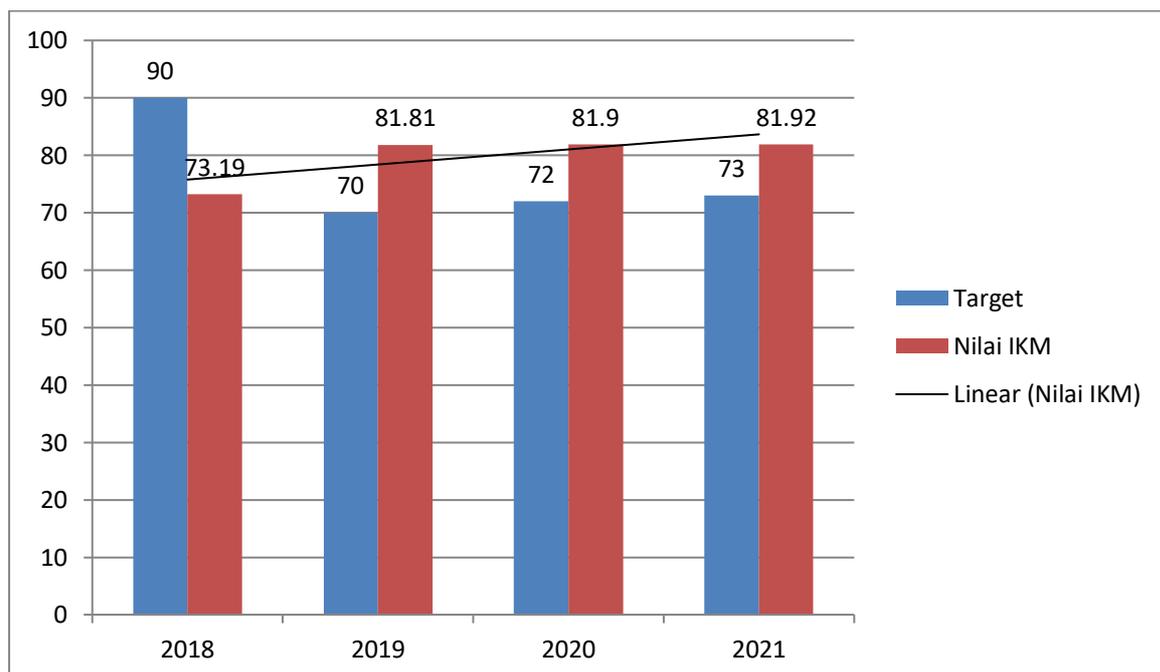


1,54%. Namun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target, capaian kinerja 2021 masih rendah dari capaian tahun 2019 yang mencapai **116,87 %**.

- c) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kecamatan Pelaihari tahun 2022 sebesar 75, maka realisasi 2021 sudah mencapai 109,2% dari target;

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Sasaran Srategis Kecamatan Pelaihari dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan Renstra Kecamatan Pelaihari 2018-2023 dalam wujud Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan nilai 73.

Untuk lebih jelasnya realisasi dan target IKM Tahun 2018-2021 Kantor Kecamatan Pelaihari dapat di lihat dari grafik tersebut dibawah ini :



Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2021

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2018 dibandingkan tahun 2019 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan sarana



prasarana pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengurusan pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari sesuai dengan kewenangan telah terlayani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pelaihari. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Ketentuan biaya tarif layanan dihapuskan / gratis pada beberapa pelayanan seperti pengolahan KTP, KK, Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan lain-lain menyebabkan salah satu unsur yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2021.

Nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan jenis layanan dari tahun 2020-2021 dikarenakan tidak ada pengaduan permasalahan pelayanan dari masyarakat yang mengurus layanan perizinan dan layanan non perizinan karena dianggap bahwa aparatur Kecamatan Pelaihari telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan izin merasa dipermudah dan waktu yang cepat sampai izin selesai dikerjakan oleh aparatur Kecamatan Pelaihari.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 889.579.768.-. dan realisasi sebesar Rp. 691.989.827.- atau 77,79 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 22 berikut :

Tabel 22. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2021

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.221.482.557,-	Rp. 7.966.392.859,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 13.149.800,-	Rp. 7.650.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 109.040.000,-	Rp. 109.040.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan		



	Ketertiban Umum	Rp. 30.480.000,-	Rp. 28.245.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.209.010.165,-	Rp. 1.101.302.910,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.597.200,-	Rp. 13.806.600,-
JUMLAH		Rp. 11.603.760.073,-	Rp. 9.169.457.369,-

Dalam rangka mendukung indikator sasaran Eselon III (Camat) sekaligus Perjanjian Kinerja Camat Pelaihari yang juga merupakan IKU Kecamatan Pelaihari yang dilaksanakan oleh seluruh Kasubbag dan Kasi lingkup Kecamatan Pelaihari dapat dijelaskan dibawah ini.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Pelaihari telah dilaksanakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dengan nilai B yang berarti secara umum implementasi SAKIP Baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, tetapi perlu sedikit perbaikan.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Pelaihari telah dilaksanakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dengan nilai BB yang berarti sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Pelaihari masih dalam proses hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim dari Menpan RB dan reviu oleh APIP Inspektorat Kab. Tanah Laut.

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Nilai Sakip dengan target 73 dengan realisasi 62,56 (B) dengan presentase 78,20 % untuk mencapai target menggunakan anggaran Rp. 1.699.400,- kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan kendala yang dihadapi yaitu kurang berperannya para Kasi dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.

- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :

a. Para kasi dan kasubbag lingkup Kecamatan Pelaihari diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan membuat laporan kegiatan, melengkapi foto dan video kegiatan serta menyimpan dalam 1 (satu) folder tersendiri di PC atau laptop.

b. Mengintensifkan kegiatan rapat staf dalam rangka pemberian arahan kegiatan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakip yaitu :

a. Mengefektifkan penggunaan media sosial resmi kecamatan dalam rangka transparansi publik, menambah platform media sosial berupa instagram, mengupdate kembali konten berita kegiatan pada website kecamatan.



3. Eselon III (Sekretaris)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 untuk persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dapat terealisasi penuh 100%. Sedangkan capaian realisasi Target Nilai RB Tahun 2021 masih dalam proses penilaian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Tabel 23. Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian SekretariatKecamatan Pelaihari

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Tatakelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan	80	62,56 (B)	78,20 %
		Nilai RB	*) menunggu hasil kemenpan rb	*)	*)
.2.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %
		Presentase pengelolaan perencanaan dan Keuangan yang tertib	100 %	100 %	100 %

Keterangan : *) menunggu hasil Kemenpan RB

Adapun realisasi capaian target terhadap peningkatan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan (Nilai SAKIP Kecamatan) dan peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian (Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib) yang ada di kecamatan Pelaihari dari tahun 2020-2021 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 24 berikut:

Tabel 24. Realisasi, Target, Realisasi dan Persentase Capaian IndikatorKinerjaSekretariatKecamatan Pelaihari

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	81,90	80	62,56	78,20
2.	Persentase pengelolaan administasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Targetnilai SAKIP tahun 2020 sebesar 75 dengan realisasi sebesar 81,90 atau dengan kata lain realisasi mencapai 116,87 %, dengan nilai komponen perencanaan kinerja 24,41 point pengukuran kinerja 16,25 point pelaporan kinerja 11,41 point evaluasi internal 6,92 point dan pencapaian kinerja 17,08 point. Realisasi 2020 melampau target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 25 berikut.



Tabel 25. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 berdasarkan Komponen penilaian

No	Komponen Penilaian	Nilai	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	20,87	
2.	Pengukuran kinerja	13,75	
3.	Pelaporan kinerja	9,97	
4.	Evaluasi internal	5,11	
5.	Pencapaian kinerja	12,88	
Jumlah		62,56	

Sumber data : Rekap hasil evaluasi SAKIP Kab. Tanah Laut Tahun 2021

Sangat diharapkan Nilai SAKIP tahun 2021 juga akan melampaui target 80 dengan usaha meningkatkan perbaikan pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi internal. Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib di lingkungan Kantor Kecamatan Pelaihari dapat terpenuhi seluruh target (100%) baik dalam hal keperluan kepegawaian dan administrasi umum.

2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait;

- 1) Realisasi Target nilai SAKIP tahun 2020 dengan tahun 2021 untuk Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sama 100%; Realisasi Indikator Nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 76,07 sedangkan tahun 2021 masih dalam proses penilaian. Namun demikian kami optimis bisa melampaui target dengan terus berusaha memperoleh nilai maksimal komponen penilaian.
- 2) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan realisasi dan capaian kinerja.
- 3) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2022 optimis dapat tercapai dengan melihat hasil realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Pelaihari. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat



4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Nilai SAKIP dan Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 10.221.482.557.- dan realisasi sebesar Rp.7.966.392.859.- atau 77,93 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 26 berikut ;

Tabel 26. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2021

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.221.482.557,-	Rp. 7.966.392.859,-
JUMLAH		Rp. 10.221.482.557,-	Rp. 7.966.392.859,-

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
 - b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan kelurahan dan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
 - c. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.
- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
 - a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Pelaihari sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
 - b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Pelaihari dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah, penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.
 - c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2021 Kecamatan Pelaihari.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakiip yaitu :
Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.



4. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Seksi)

Kecamatan Pelaihari sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan Pelaihari. Ada 9 (sembilan) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Pelaihari. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tabel 27. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 desa	15 desa	15 Desa	100 %
2. Memfasilitasi jumlah desa yang menyampaikan LPPD dan LKPD tepat waktu	Jumlah desa yang menyampaikan Laporan LPPD dan LKPD dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100 %
3. Memonitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 desa	15 desa	15 desa	100 %

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100 %. Terfasilitasinya semua desa baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan BPD melalui pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan serta penyampaian regulasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan Kasi Pemerintahan Desa bersama dinas/instansi yang berwenang.

Untuk kegiatan Tahun 2021 Seksi Tata Pemerintahan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan bagi Lurah/Kepala Desa, Kasi Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta sebagai Narasumber dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tanah Laut, Unsur TNI-Polri dengan tujuan penguatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air berkenaan keamanan ketertiban masyarakat terkait dalam masa Pandemi COVID-19 agar ketahanan dan kewaspadaan nasional tetap menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.





Gambar 2. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Tahun 2021 bagi Kepala Desa, Kasi Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat Kecamatan Pelaihari

- b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi mengenai Hukum Pertanahan bagi di ikuti Lurah/Kepala Desa, aparat desa, stake holder terkait dalam hal permohonan pembuatan akte tanah, pembuatan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar para pemohon atau masyarakat memahami mengenai tata cara dan pengurusan akte tanah sampai menjadi sertifikat hak milik secara legal hukum serta menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Dokumen yang telah legal diakui pemerintah dapat di pergunakan untuk tambahan modal sebagai agunan untuk mendapatkan kredit bank.



Gambar 3. Penyuluhan Sosialisasi Hukum Pertanahan Tahun 2021 bagi kepala Desa, Lurah, Kasi Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat Se Kecamatan Pelaihari



Sedangkan Pembinaan dan monitoring penyusunan laporan kependudukan juga terlaksana pada 15 (lima belas) desa dan 5 Kelurahan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat se Kecamatan Pelaihari yang terdiri dari 15 Desa dan 5 Kelurahan terkait perubahan data kependudukan, pindah domisili dan pembuatan akte kependudukan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data penduduk laki-laki dan data penduduk perempuan serta jumlah kelahiran penduduk serta jumlah kematian penduduk untuk data bantuan sosial, data pemilih pada pemilu sehingga mencakup data yang terbaru.

Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata Pemerintahan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Kasi Tapem (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf (Jabatan Pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan antar SKPD, Forkompimda Kabupaten dan Kecamatan, instansi vertikal lainnya yang mengikutsertakan Kecamatan Pelaihari dalam setiap event kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kasi Tapem yaitu merekapitulasi data jumlah penduduk, fasilitasi pemilihan kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), fasilitasi pemilihan umum legislatif, Pemilihan Presiden, Pemeliharaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta penyusunan LPPD Desa.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan

1. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang hukum pertanahan bagi lurah/kepala desa, stakeholder terkait dalam hal permohonan akte tanah, pembuatan bea hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kecamatan Pelaihari.
2. Masih kurangnya aparat desa dan operator desa melakukan updating data profil desa disistem aplikasi profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Tahun 2021 sehingga mendapat teguran dari Dinas PMD Kab. Tanah Laut karena akan dimonitoring dan evaluasi oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
3. Terlambatnya aparat desa untuk melaporkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) sesuai tepat waktu, karena laporan LPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban mandat pemerintahan dan pembangunan yang diemban aparat desa kepada masyarakat desa, kepada Kecamatan dan Dinas PMD Kab. Tanah Laut.



Solusi kendala/Permasalahan yang dihadapi Seksi Tata Pemerintahan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai hukum pertanahan bagi lurah/kepala desa, stakeholder terkait dalam hal permohonan akte tanah, pembuatan bea hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kecamatan Pelaihari.
2. Melakukan pelatihan bagi aparatur desa dan operator desa pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) pada 15 Desa se Kec. Pelaihari dengan di dampingi oleh Dinas PMD Kab. Tanah Laut.
3. Memberikan surat pemberitahuan untuk menyampaikan laporan LPPD tepat waktu diterima sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

Rencana aksi yang akan dilakukan Seksi Tata Pemerintahan

1. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pejabat Notaris untuk memberikan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan pembuatan sertifikat tanah hak milik, hak guna usaha agar aparatur desa dan masyarakat lebih mudah mengurus dengan pelayanan cepat, mudah dan biaya murah.
2. Menyusun jadwal pelatihan bagi aparatur desa atau operator desa pertriwulan dengan pejabat yang membidangi atau petugas admin aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) pada Dinas PMD Kab. Tanah Laut.
3. Melakukan pendampingan dan monev secara berkala bagi desa yang belum menyampaikan LPPD Desa kepada kecamatan dan Dinas PMD.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100% kecuali realisasi capaian jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP hanya mencapai 61,66% dari target 60Dokumen, realisasi fasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi terealisasi 5 kelompok (20 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 28 berikut.



Tabel 28. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	1 kelompok	5 Kelompok	2 Kelompok	40 %
2. Memberikan pembinaan tentang penyuluhan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	5 dokumen	5 Kel / 15 Desa	2 dokumen	40 %
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa	15 desa	15. desa	100 %
4. Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersial	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial sesuai SOP	16 dokumen	33 Dokumen	33 dokumen	55 %
5. Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

Pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil produksi direncanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56, namun tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan COVID19. Kegiatan promosi 5 kelompok Desa Pelaihari yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, sewa tenda, asinan buah tetap berjalan sampai dengan sekarang.

Salah satu kelompok dari Desa Bumi Jaya yaitu Kelompok "Rumus" dengan bidang usaha catering makanan, sewa tenda dan lain-lain sampai dengan sekarang.

Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 15 (lima belas) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 15 (lima belas) desa yang ada di Kecamatan Pelaihari dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .





Gambar 4. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelaihari

Pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan oleh 15 desa yang ada dilingkup kecamatan Pelaihari dan dilanjutkan dengan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan utusan desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



Gambar 5. Pelaksanaan Musrenbang Desa Atu-Atu di Kecamatan Pelaihari

Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56 dibulan Desember dilaksanakan lomba Kebersihan Kantor Desa Se-Kecamatan Pelaihari. Aspek penilaian lomba meliputi aspek kebersihan gedung kantor, Aspek kerapian dan aspek kenyamanan dan estetika. Adapun Pemenang lomba kebersihan Kantor Desa yaitu Juara 1 DesaBumi Jaya, Juara II Desa Sumber Mulia dan Juara III Desa Pemuda. Kegiatan ini diselenggarakan dan dfasilitasi oleh Kecamatan Pelaihari bersama pendamping Desa dan Bank Kalsel Cabang Pembantu Pelaihari.

Kegiatan selanjutnya pada Seksi PMD/K pada Kecamatan Pelaihari juga melaksanakan Evaluasi APBDesadan APBDesa Perubahan untuk Tahun Anggaran 2022 pada 15 Desa se Kecamatan Pelaihari yang dfasilitasi oleh Tim



Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan Kecamatan Pelaihari, hal ini sebagai perwujudan pengawasan penatausahaan keuangan desa baik Dana Desa dari Dana Kemendes dan PDT maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 6. Pelaksanaan Evaluasi APBDes Kampung Baru di Kecamatan Pelaihari

Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi PMD/K

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi PMD/K (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf PTT dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD/K yaitu melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Pelaksanaan Evaluasi APBDes, Evaluasi APBDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K

1. Terbatasnya usulan perencanaan pembangunan pada hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan untuk keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



3. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan bagi aparatur desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun Dana Desa dari Kementrian Desa dan PDT yang berasal dari Dana APBN.

Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K

1. Melakukan skala prioritas untuk usulan perencanaan pembangunan serta pendekatan kepada anggota legislatif sesuai daerah pemilihan (dapil) untuk dimasukkan pada usulan pokok pikiran (pokir) DPRD.
2. Melakukan indentifikasi program dan kegiatan desa yang di susun oleh aparatur desa akan di selaraskan dengan Rencana Kerja SKPD, RPJMD dan visi misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sehingga percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat direalisasikan bagi masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam penataan administrasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang di dukung dengan aplikasi sistem manajemen keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi PMD/K yaitu :

1. Meningkatkan perbaikan kualitas rancangan kerja awal usulan perencanaan pembangunan yang terdiri dari usulan aspirasi masyarakat, pokok pikiran DPRD (Pokir DPRD) dimulai Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang Kecamatan.
2. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal, dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk penyusunan standar satuan harga (SSH) dan Pelaporan Aset Desa sebagai lampiran penyusunan Laporan Keuangan Desa.

3) Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 29. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1. Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di Bidang	Jumlah penerima hibah untuk organisasi masyarakat yang di bina bidang	2 Kelompok	15 dokumen hibah	14 Kelompok	93,33 %



Kemasyarakatan	kemasyarakatan				
2. Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan yang sesuai SOP	1 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67 %
3. Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasiliasi penyaluran bantuan sosial	6276 KK	1500orang	324 orang	100 %

Kegiatan pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan di kecamatan Pelaihari yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Pelaihari. Fasilitas dan pembinaan terutama dalam dalam rangka mempersiapkan kontingen Kecamatan Pelaihari untuk lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 di Kecamatan Takisung.

Fasilitas kegiatan dibidang sosial keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan yang di targetkan 3 kegiatan hanya terealisasi 2kegiatan (50 %) yaitu kegiatan Pengirman Kafilah Kec. Pelaiharimengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2021 Tingkat Kabupaten di Kec. Takisung.Karena kegiatan masih dalam pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Level 3 dalam menjaga protokol kesehatan 5 M maka para peserta langsung menuju tempat acara kegiatan lomba dan hanya perwakilan yaitu unsur Camat dan Pengurus LPTQ Kecamatan Pelaihari menghadiri acara pembukaan dan penutupan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2021 di Kecamatan Takisung.



Gambar 7. Kafilah MTQKecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat KabupatenTanah Laut Tahun 2021di Kecamatan Takisung

Pada Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 di Kecamatan Takisung, kafilah Kecamatan Pelaihari mendapat urutan nomor 2 dari 11 (sebelas) Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.





Gambar 8. Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari yang mendapat hadiah juara di MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Kegiatan lainnya yakni Puasa Bersama Bupati dan Waki Bupati Tanah Laut bersama masyarakat pada bulan ramadhan.



Gambar 9. Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Pemuda pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Pelaihari pada tahun 2021 dapat mencapai target yaitu dari target 324 KK dapat terealisasi sebanyak 324 KK. Adapun rincian bantuan sosial yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 30 berikut :

Tabel 30. Jenis Bantuan Sosial dan Jumlah Penerima Bantuan Kecamatan Pelaihari TA. 2021

No	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	324 KK
JUMLAH		324 KK

Sumber data : Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pelaihari Tahun 2021

Selain itu kegiatan yang dilaksanakan Kasi Kesmas yaitu Sosialisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Tanah Laut yaitu Program Visi dan Misi Kepala Daerah Pemberian Hibah 1



M untuk Kecamatan dengan organisasi kemasyarakatan yang menerima hibah sebanyak 15 organisasi dengan jumlah organisasi yang merealisasikan sebanyak 14 organisasi sedangkan 1 organisasi tidak melaksanakan karena COVID-19.



Gambar 10. Rapat Koordinasi Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Dana Hibah pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Kemasyarakatan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (jabatan pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan fasilitasi kafilah Kec. Pelaihari mengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 di Kec. Takisung, kegiatan Buka Puasa bersama Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta masyarakat pada bulan ramadhan Tahun 1442 h, Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran hibah yaitu :

- Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan dalam melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan dana hibah karena kuitansi yang dibelanjakan tidak mengikuti RAB pencairan dan lampiran pendukung SPJ nya.



Solusi yang dilakukan dalam penyaluran hibah yaitu :

- Melakukan Sosialisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Hibah kepada organisasi penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu :

- Menyusun draft tahapan penyampaian dan verifikasi proposal, serta menyesuaikan satuan standar harga yang dibuat Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut sehingga rencana anggaran biaya (RAB) memakai Standar Harga Pemerintah Daerah dengan bimbingan Seksi Kemas Kecamatan Pelaihari.



Gambar 11. Kegiatan Organisasi Masyarakat yang menggunakan dana hibah Kecamatan Pelaihari

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 31. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di fasilitasi	1 kejadian	4Kejadian	2 Kejadian	50 %
2. Membina kelompok masyarakat di Bidang Ketentraman dan	Jumlah kelompok masyarakat di Bidang Ketenraman dan Ketertiban yang aktif	2 kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %



Ketertiban					
3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	2 kejadian	5 Kejadian	5 Kejadian	100 %
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang I monitoring	11 kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100 %

Pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di 15 (lima belas) desa yang ada di kecamatan Pelaihari.

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Pelaihari yang di monitoring selama tahun 2021 terealisasi 2 (dua) penanganan yaitu;

1. Patroli bersama dengan Satpol PP, Polsek dan Danramil kecamatan Pelaihari tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 ke tempat kerumunan masyarakat desa seperti warung, poskamling dan pasar. Menegur dan membubarkan kerumunan serta mensosialisasikan prokes COVID 19 dan membagikan Masker kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker.



Gambar 12. Operasi Gabungan Penerapan Protokol Kesehatan di Kelurahan Pabahanan

2. Memfasilitasi masalah sengketa tanah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Desa Pangung Baru mengenai pembangunan pagar.
3. Memfasilitasi masalah sengketa tanah di Danau Bom di Kelurahan Pelaihari.
4. Patroli bersama Tim Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Badan Kesbangpol dan DP2KB dan P3A melakukan sidak dan pengecekan ke warung-warung di Kelurahan Sarang Halang yang menggunakan anak di



bawah umur untuk bekerja, setelah diberikan pengertian anak tersebut di kembalikan kepada orang tuanya.



Gambar 13. Rapat Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari

5. Selain tersebut diatas, Kecamatan Pelaihari tahun 2021 mendapat alokasi pelaksanaan operasi pasar gas LPG 3 kg untuk masyarakat umum bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) Kabupaten Tanah Lautdi laksanakan di desa telaga dan desa panggung. Kegiatan operasi pasar gas LPG 3 kg bertujuan mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat serta menurunkan harga jual yang mencapai harga Rp. 32.000 s.d. Rp.35.000/buah. Padahal harga di pangkalan hanya Rp.19.000/buah.



Gambar 14. Rapat Musyawarah Desa tentang Pendistribusian LPG 3 Kg

Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertibandi Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Trantib(Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh



Kasi Ketentraman dan Ketertiban yaitu melakukan kegiatan fasilitasi penanganan gangguan dan keamanan, membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Kurangnya personel/SDM dalam melakukan patroli melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sengketa dibidang pertanahan di wilayah Kecamatan Pelaihari serta penertiban warung-warung yang berjualan memperkerjakan anak-anak dibawah umur.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan protokol kesehatan (Prokes) dalam melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, kegiatan sosial di tempat kerja, pasar, dan fasilitas publik yang menjadi kerumunan atau perkumpulan orang banyak.
3. Kurang tepatnya data penerima gas LPG 3 kg bagi masyarakat miskin, Pengusaha UMKM dan harga jual LPG 3 kg yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai harga pangkalan/agen penjual lingkup Kecamatan Pelaihari.

Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Melakukan usulan penambahan personel/SDM pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam kegiatan penegakan Perda Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sengketa dibidang pertanahan di wilayah Kecamatan pelaihari serta memberikan sosialisasi kepada pemilik warung untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur.
2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat dengan meminta bantuan dan dukungan dari para tokoh alim ulama, para pengurus masjid, musholla, majelis ta'lim untuk agama islam, para pastor untuk gereja, para pendeta untuk pura, dan para biksu untuk vihara beserta forkompimcam Kec. Pelaihari menjaga protokol kesehatan selama menjalankan kegiatan ibadah masing-masing dengan melakukan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) sesuai arahan Tim Gugus Tugas COVID 19 Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan Agen Penjual Gas LPG 3 kg lingkup Kec. Pelaihari agar penyaluran gas LPG 3 kg sesuai dengan *data by name by addres* yang sudah mendapat verifikasi dari Kepala Desa/Lurah



setempat berdasarkan musyawarah desa/Kelurahan, dan menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai kewajaran dan terjangkau oleh masyarakat.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

1. Melakukan *mapping* (pemetaan) dan sistem operasional prosedur atas perijinan pembangunan rumah dan toko bekerja sama dengan SKPD terkait (DPMPSTSP Tala, Bapenda Tala, Kantor ATR Tala, DPRKPLH Tala) bagi masyarakat sehingga bentuk monitoring dan evaluasi atas pelayanan pembuatan IMB dapat dievaluasi secara berkala.
2. Melakukan sinergi dan koordinasi kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pastor, pendeta, dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dalam kegiatan aktivitas ibadah dan aktivitas sosial sebagai kewaspadaan bersama dalam menurunkan angka penularan COVID 19 di Kecamatan Pelaihari.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas distribusi penyaluran dan penjualan gas LPG 3 kg dan mengontrol kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat agen dan pengecer di mini market, pasar, toko/warung yang menjual tabung gas LPG 3 kg agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

5) Kepala Seksi Pelayanan

Tabel 32. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 jenis pelayanan	15 jenis pelayanan	15 jenis pelayanan	100 %
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	1 pengaduan	0 Pengaduan	0 Pengaduan	0 %
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100 %

Pencapaian

SasaranstrategisKasiPelayanandalamrangkamenunjangpencapaian sasaran strategis Kecamatan Pelaihari, salah satu kegiatan yang dilaksanakandalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaianIndikatorKinerjaUtama(IKU)Kecamatan Pelaihari Tahun2021 yakniNilaiIndeksKepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Pelaihari pada Tahun 2021 memperoleh IKM sebesar 3,277(81,92) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.



Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2021 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Izin Bilyard Non Komersial
5. Izin Playstation/Video Game

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Pelaihari. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan non perizinan dan 4 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2021 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 29 berikut:



Tabel 33 : Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	-	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	138	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Pindah Domisili	23	Seksi Tapem
4	Pelayanan Pengantar KTP	-	Seksi Tapem
5	Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga	-	Seksi Tapem
6	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	395	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	312	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Proposal Bantuan	-	Seksi Kemasyarakatan
11	Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik	20	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	-	Seksi Trantib
13	Pelayanan Surat Kehilangan	8	Seksi Pelayanan
14	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	9	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial	49	Seksi PMD
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	9	Seksi Pelayanan
17	Pelayanan Izin Bilyard Non Komersial	-	Seksi Pelayanan
18	Pelayanan Izin Playstation/Video Game	-	Seksi Pelayanan

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,92 dari 150 responden yang mengisi kuisioner.



Gambar 15. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Pelayanan surat izin keramaian tidak ada realisasi, di karenakan penerapan protokol kesehatan COVID19 yang tidak mengijinkan adanya kerumunan/berkumpulnya massa/orang pada suatu tempat yang akan berdampak pada peningkatan penyebaran COVID19. Walaupun demikian masih ada warga yang datang mengurus izin keramaian namun ditolak dengan alasan tersebut diatas.

Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan



(Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah belum adanya aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari yang terhubung dengan Kelurahan dan Pemerintah Desa.

Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu Mencoba mengembangkan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai saki yaitu :

- ❖ Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mendorong pengembangan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan.
- ❖ Melakukan pembuatan media sosial untuk mendukung informasi akan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan sebagai sarana informasi publik terhadap kinerja Kecamatan.



Gambar 16. Kegiatan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelaihari Tahun 2021





Gambar 17. Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pelaihari

Rencana Aksi yang dilaksanakan pada Seksi Pelayanan

Melakukan komitmen pelayanan sesuai Zona Integritas (ZI) yang kuat pada personel/SDM Kecamatan Pelaihari agar pelayanan terpadu kecamatan kepada masyarakat lingkup Kecamatan Pelaihari.

6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 34. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit	227 Unit	227 unit	227 %
3. Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	16 orang	18 orang	18 orang	100 %

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yaitu 18 (enam belas) orang ASN dan 8 (delapan) orang PTT. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai 100%.

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dengan baik dan memadai sebagai sarana dan penunjang kegiatan sebanyak 227 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang dalam kondisi baik.

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2021 sebanyak 18 (delapan belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta. Pada Tahun 2021 Jumlah pegawai naik gaji berkala sebanyak 5 orang dan kenaikan pangkat sebanyak 3 orang. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2021



sudah dilaksanakan penilaian oleh pimpinan sesuai tingkatannya dan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari tidak ada yang memiliki nilai rata-rata kurang atau sangat kurang.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan pengadaan barang dan jasa yaitu :



Gambar 18. Pembelian Kursi Rapat pada Kecamatan Pelaihari



Gambar 19. Pembelian AC Ruang Aula Pertemuan Kecamatan Pelaihari



Gambar 20. Pemasangan Backdrop Aula Pertemuan Kecamatan Pelaihari



Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu (2 orang) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

1. Kurangnya petugas staf/ASN pengelola kearsipan dalam mengerjakan tugas mengelola arsip di Kecamatan Pelaihari.
2. Belum adanya dengan perintah diwajibkan sistem aplikasi Sosialita pada pengadaan barang dan jasa belum maksimal dilakukan terkendala belum lengkapnya permintaan untuk pembelian barang dan jasa.

Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

1. Melakukan usulan penambahan personel staf/ASN pengelola kearsipan yang mempunyai keahlian menyusun arsip, menata arsip, didukung sarana dan prasarana ruang arsip yang memadai.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi atas manfaat aplikasi sosialita bagi penyedia barang dan jasa untuk berkontribusi dan mengikutsertakan para pengusaha UMKM dalam pembangunan daerah.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Memberdayakan pegawai PTT yang ada membantu dalam mengelola kearsipan yang ada di Kecamatan Pelaihari.



2. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi yang bergerak dibidang penyedia barang dan jasa (KADIN, GAPENSI, HIPMI dll) agar bergabung dalam aplikasi Sosialita sebagai aplikasi katalog lokal yang dibuat Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kab. Tanah Laut untuk memudahkan staf ASN Kec. Pelaihari menggunakan aplikasi Sosialita dan menggunakan dalam penatausahaan keuangan daerah.

7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

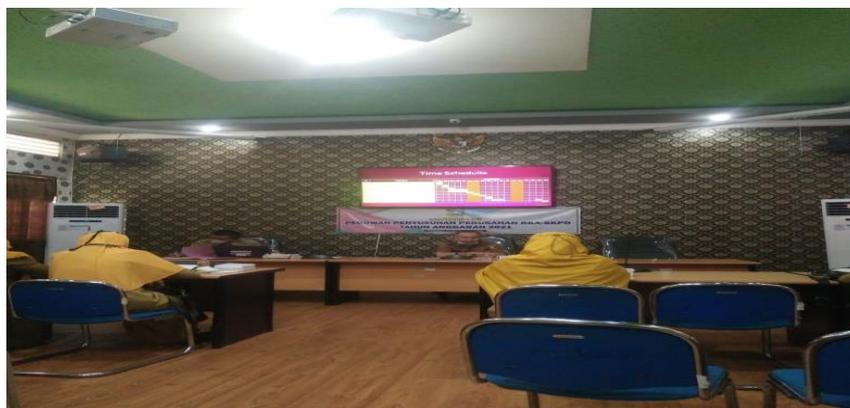
Tabel 35. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	100 %
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Renstra 2019-2023, Dokumen Renja 2022, Dokumen DPA-Perubahan 2021 dan Penetapan Kinerja 2021. Dengan demikian realisasi capaian target sesuai target (100%).



Gambar 21. Asistensi DPA Perubahan 2021 Kecamatan Pelaihari dengan TimTAPD di Aula BPKAD Kab. Tanah Laut



Gambar 22. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA Perubahan SKPD Tahun 2021 di Aula Rapat BPKAD Kab. Tanah Laut



Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2020, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2020, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2020 dan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis 2020. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%



Gambar 23. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD Tahun 2022 di Aula Rapat BPKAD Kab. Tanah Laut



Gambar 24. Dokumen DPA APBD dan DPA APBD Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2021



Gambar 25. Dokumen Renja SKPD Tahun 2022 dan Dokumen LKPJ-LPPD Kecamatan Pelaihari Tahun 2021





Gambar 26 : Dokumen Lapkin Kecamatan Pelaihari Tahun 2020

Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu (2 orang) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Kurangnya personel staf/ASN yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam update peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemendagri RI dan Kemenkeu RI.



Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan penambahan personel staf/ASN subbag Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Melakukan usulan anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimtek, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah

Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan agar penyelesaian kerja menjadi tepat waktu sesuai aturan perundangan-undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan hardware, software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2021 untuk eselon IV mencapai 84,42 %. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2019-2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 36.

Tabel 36. Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
2.	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Penjaringan aparat desa dan BPD	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
3.	Jumlah Desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
4.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil	1 Kelompok	15 Kelompok	2 Kelompok	13,33



	produksinya				
5.	Jumlah desa yang menyusun profil desa dengan baik	5 dokumen	15 dokumen	2 kelompok	13,33
6.	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100
7.	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	16 dokumen	60 dokumen	33 dokumen	55
8.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100
9.	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang di bina di bidang kemasyarakatan	2 kelompok	15 kelompok	14 kelompok	93,33
10.	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga sesuai SOP	1 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	66,67
11.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosial	6276 kk	324 kk	324 kk	100
12.	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	2 kejadian	4 kejadian	2 kejadian	50
13.	Jumlah kelompok masyarakat di bidang Ketentraman dan ketertiban yang aktif	20 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100
14.	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	5 kejadian	5 kejadian	5 kejadian	100
15.	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	11 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100
16.	Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN) sesuai SOP	15 jenis pelayanan	15 jenis pelayanan	15 jenis pelayanan	100
17.	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	1 pengaduan	2 pengaduan	1 pengaduan	50
18.	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
19.	Jumlah ASN yang adminstras perkantornya terlayani dengan baik	18 orang	18 orang	18 orang	100
20.	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	227 unit	227 unit	227 unit	100
21.	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100
22.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun seusai dengan ketentuan yang berlaku	11 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	100
23.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	11 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	100
Rata-Rata Capaian					84,42

1) Perbandingan realisasi dengan target

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 ada beberapa capaian yang menurun yaitu Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya(13,33 %), dan Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP(93,3 %). Penurunan capaian pada kegiatan tersebut dikarenakan refofusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan kegiatan yang sudah direncanakan juga tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan prosedur kesehatan penanganan COVID19.



Sebaliknya realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2021 melampaui target seperti Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial (100 %).

Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat di Kecamatan Pelaihari tahun 2021 sebanyak 2 kejadian dari target 4 kejadian. Hal ini karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro sebagai antisipasi penyebaran COVID 19 oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan dan Penanganan COVID 19 Kab. Tanah Laut, sehingga pelaksanaan kegiatan di pasar, aktivitas kegiatan keagamaan dan aktivitas lainnya diatur sesuai dengan protokol kesehatan.

Dengan terbukanya informasi publik berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

2) Perbandingan realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 untuk kinerja eselon IV mengalami penurunan dari 96,45% menjadi 84,42% di karenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan prosedur kesehatan penanganan COVID19.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan capaian kinerja pada indikator kinerja Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya dikarenakan tidak terealisasinya kegiatan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Pameran ekspo hari jadi kabupaten Tanah Laut selama ini jadi ajang promosi. Dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut mengakibatkan fasilitasi pihak kecamatan tidak mencapai target 5 kelompok.

Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP dari target 4 kegiatan hanya terlaksana 3kegiatan yaitu pelaksanaan Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 di Kecamatan Takisung, kegiatan buka puasa bersama/safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta unsur forkompimda serta kepala SKPD dengan masyarakat Kecamatan Pelaihari, pelaksanaan Hibah 1 Milyar bagi organisasi masyarakat dalam bidang keagamaan, kepemudaan, seni



dan budaya. Ada 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksananya yaitu Seleksi Tiawatil Qur'an (STQ) tingkat Kecamatan Pelaihari dengan alasan masih pandemi dan protokol kesehatan COVID19.

Menurunnya capaian kinerja bukan dikarenakan menurunnya kinerja ASN lingkup Kecamatan Pelaihari, namun lebih pada akibat dampak pandemi COVID19. Atas arahan Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan **COVID-19** sebagai **bencana nasional**, Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan **Bencana** Non-Alam Penyebaran **CORONA** VIRUS DISEASE 2019 (**COVID-19**) Sebagai **Bencana Nasional**. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang diamanatkan kepada Kecamatan Pelaihari Tahun 2021 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 11.750.376.143,- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 11.603.760.073,-. Terjadi penurunan anggaran sebesar 1,25%. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp.9.169.457.219,- dengan capaian sebesar 79,02 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan 2021 (Rp.)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.185.720.197,00	10.221.482.557,00	7.966.392.509,00	77,93
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.594.000,00	4594.000,00	1.699.400,00	36,99
1	Penyusunan dokumen perencanaan daerah	800.000,00	800.000,00	199.800,00	24,98
2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	999.600,00	83,30
3	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	41,67



	4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	1.394.000,00	1.394.000,00	0	0
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.575.497.571,00	9.575.497.571,00	7.456.493.715,00	77,87
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.518.363.619,00	9.518.363.619,00	7.413.260.715,00	77,88
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	624.000,00	624.000,00	0	0
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56.509.952,00	56.509.952,00	43.233.000,00	76,51
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.353.830,00	305.860.430,00	272.666.722,00	89,15
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.614.590,00	2.614.590,00	1.898.500,00	72,61
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.472.440,00	164.472.440,00	144.478.322,00	87,84
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.142.400,00	22.954.000,00	22.954.000,00	100,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.152.400,00	7.852.400,00	5.680.000,00	72,34
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.972.000,00	107.967.000,00	97.655.2000,00	90,45
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.498.336,00	294.754.096,00	211.004.413,00	71,59
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.803.328,00	70.803.328,00	66.481.045,00	93,90
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	36.049.600,00	25.022.410,00	71,63
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.040.890,00	49.297.050,00	47.385.000,00	96,12
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.604.118,00	138.604.118,00	71.315.958,00	51,45
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.776.460,00	40.776.460,00	24.528.609,00	60,15
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.326.460,00	36.326.460,00	20.228.609,00	55,69
	2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	4.450.000,00	4.450.000,00	4.300.000,00	96,63
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.149.800,00	13.149.800,00	7.650.000,00	58,18



	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.149.800,00	13.149.800,00	7.650.000,00	58,18
	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.149.800,00	13.149.800,00	7.650.000,00	58,18
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109.040.351,00	109.040.351,00	52.060.000,00	47,74
	A	Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	109.040.351,00	109.040.351,00	52.060.000,00	47,74
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.549.900,00	25.549.900,00	14.325.000,00	56,07
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	42.535.751,00	42.535.751,00	5.950.000,00	13,99
	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.594.700,00	40.594.700,00	31.785.000,00	77,61
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.480.000,00	30.480.000,00	28.245.000,00	92,67
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	30.480.000,00	30.480.000,00	28.245.000,00	92,67
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.480.000,00	30.480.000,00	28.245.000,00	92,67
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.391.388.595,00	1.209.010.165,00	1.101.302.910,00	91,09
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.391.388.595	1.209.010.165,00	1.101.302.910,00	91,09
	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.047.300	8.047.300,00	7.948.900,00	98,78



	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan kora, Regional, dan Nasional	1.200.962.855,00	1.200.962.855,00	1.093.354.010,00	91,03
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.597.200,00	20.597.200,00	13.806.600,00	67,03
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.597.200,00	20.597.200,00	13.806.600,00	67,03
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.157.300,00	7.157.300,00	6.936.600,00	96,92
	2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.439.900,00	13.439.900,00	6.870.000,00	51,12
JUMLAH			11.750.376.143,00	11.603.760.073,00	9.169.457.219,00	79,02



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Pelaihari pada tahun 2021 menganggarkan jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 19.233.250.- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 18.832.500.- .

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi pengurangan belanja anggaran awal sebesar Rp. 11.750.376.143,- kemudian berkurang menjadi Rp. 11.603.760.073,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp.9.169.457.219,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,02% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.434.302.854.- (20,98%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 38 sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	PAGU MURNI 2020	PAGU PERUBAHAN 2020	REALISASI (Rp).	(%)
1.	PENDAPATAN				
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	- Retribusi Daerah	19.233.250,-	19.233.250,-	18.832.500,-	97,92
	BELANJA	11.750.376.143,-	11.603.760.073,-	9.219.014.187,-	79,45
	a. BELANJA OPERASI	11.584.012.473,-	11.407.140.243,-	9.047.220.927,-	79,31
	- Belanja Pegawai	9.518.363.619,-	9.518.363.619,-	7.413.260.715,-	77,88
	- Belanja Barang dan Jasa	1.066.288.854,-	889.416.624,-	700.561.612,-	78,77
	- Belanja Hibah	999.360.000,-	999.360.000,-	933.398.600,-	93,40
	b. BELANJA MODAL	166.363.670,-	196.619.830,-	171.793.260,-	87,37
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.413.670,-	136.669.830,-	122.236.442,-	89,44
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.950.000,-	59.950.000,-	49.556.818,-	82,66

2. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Tabel 39. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (Rp).
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.221.482.957,-	7.966.392.509,-	77,93
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.149.800,-	7.650.000,-	58,18
		Program Peremberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	109.040.351,-	52.060.000,-	47,74
		Program Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.480.000,-	28.245.000,-	92,67
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1.209.010.165,-	1.101.302.910,-	91,09



	Umum			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.597.200,-	13.806.600,-	67,03
JUMLAH		11.603.760.073,-	9.169.457.219,-	79,02

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 84,72% maka realisasi keuangan sebesar 79,02% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Persentase Keuangan, Fisik dan Efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Fisik	% Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	73,63	100	26,37
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	0	100	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	71,34	100	28,66

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Pada tahun 2020 ada 9 Program dan 19 kegiatan, dibandingkan tahun 2021 jumlah program 6 dan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran 2021 untuk belanja daerah sebesar Rp.11.603.760.073,-.Dibandingkan tahun 2020 jumlah anggaran belanja langsung menurun yaitu sebesar Rp. 889.579.768,- akibat refofusing. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2020 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 41. Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2020-2021

TAHUN 2020		TAHUN 2021		
Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Beserta Perlengkapannya			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Penyusunan perencanaan dan			Koordinasi dan Penyusunan



	kinerja SKPD			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
	Penyelenggaraan pelayanan masyarakat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketertiban umum masyarakat			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pembinaan perlindungan linmas			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Program koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
	Pentas seni, budaya festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan monitoring desa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Program Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pembinaan dan pelatihan masyarakat desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah



				Kerja Kecamatan
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umu	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasiona Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Program Pnyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Antar Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Total		Total		
9	19	6	10 Kegiatan	27 Sub Kegiatan
Total Anggaran		Total Anggaran		
Rp. 889.579.768,-		Rp. 11.603.760.073,-		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2021 sebesar Rp.9.219.014.187,- dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 691.989.827,-. Belanja Langsung tahun



anggaran 2021 mengalami kenaikan pagu dan juga realisasi dibanding tahun 2020.

Belanja barang dan jasa yang pada tahun 2021 mencapai Rp. 700.561.612,-dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp.641.364.827,-.

Sedangkan untuk belanja pegawai berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimasukkan pada Belanja Langsung dengan nomenklatur Belanja Operasi maka Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 7.413.260.715,- dibanding tahun anggran 2020 sebesar Rp. 6.071.823.635,-. Belanja Modal terjadi kenaikan di tahun 2021 sebesar Rp. 171.793.260,- dari Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 23.325.000,- begitu juga dengan Jumlah pendapatan dari retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2020-2021

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)	
		2021	2020
1.	PENDAPATAN	Rp. 18.832.500,-	Rp. 6.689.875,-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 18.832.500,-	Rp. 6.689.875,-
	Retribusi Daerah	Rp. 18.832.500,-	Rp. 16.087.875,-
2.	BELANJA	Rp. 9.219.014.187,-	Rp. 6.763.813.462,-
	BELANJA OPERASI	Rp. 9.047.220.927,-	Rp. 6.740.488.462,-
	Belanja Pegawai	Rp. 7.413.260.715,-	Rp. 6.071.823.635,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 700.561.612,-	Rp. 896.264.366,-
	Belanja Hibah	Rp. 933.398.600,-	0
	BELANJA MODAL	Rp. 171.793.260,-	Rp. 23.325.000,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 122.236.442,-	Rp. 23.325.000,-
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 49.556.818,-	0



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban ketiga terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 3 sasaran dan 23 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 79,02. % dengan rincian 18 (delapan belas) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 1 indikator dengan tingkat kinerja **Baik**, 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup**, dan 1 dengan nilai **kurang**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Pelaihari
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascadedown*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
6. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam Diklat/Bimtek bagi pegawai lama.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur kecamatan serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan daerah pada umumnya



8. Demikian laporan kinerja Kecamatan Pelaihari ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Camat Pelaihari,



DWI ANGGRIAN, S.STP
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Nama SKPD : Kecamatan Pelaihari
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat	1 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	Hasil survei	Semua Seksi di Kecamatan

Pelaihari, Januari 2021

CAMAT PELAIHARI,



DWI ANGGRANI, S.STP
Pembina TK.I
NIP. 19780313 199612 2 001

POHON KINERJA SKPD KECAMATAN PELAIHARI

Kinerja Camat
1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat
Indikator Kinerja :
1. Indek kepuasan Masyarakat

Kinerja Sekcam
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Kinerja
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan pelaporan Keuangan
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
Indikator Kinerja :
1. Nilai SAKIP Kecamatan
2. Tingkat Kepuasan Pelayanan
3. Persentase ASN yang terlayani administrasi umum dan Kepegawaianya dengan baik

Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian :
1. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran
2. Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor
3. Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja :
1. Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik
2. jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
3. jumlah ASN yang administrasi kepegawaiannya terlayani dengan baik

Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :
1. Menyusun dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan
2. menyusun laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan
Indikator Kinerja :
1. Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan

Kinerja Kasi Pemerintahan
1. Fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD
2. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD
3. monitoring penyusunan laporan kependudukan
Indikator Kinerja :
1. jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik
2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD
3. jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat

Kinerja Kasi Kemasyarakatan
1. Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan
2. Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan
3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan
Indikator Kinerja :
1. Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang sosial,
2. Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP.
3. Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya

Kinerja Kasi PMD
1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi.
2. Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil
Indikator Kinerja :
1. jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya
2. jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik
3. jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik
4. jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP

Kinerja Kasi Trantib
1. memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban
3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan
Indikator Kinerja :
1. jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat d kecamatan yang di fasilitasi
2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif
3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring

Kinerja Kasi Pelayanan
1. Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan
2. memfasilitasi penanganan aduan masyarakat
Indikator Kinerja :
1. Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP
2. Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi.

Pelaihari, Januari 2021

Camat Pelaihari,

DWI ANGGRIANI, S.STP
NIP: 19780313 199612 2 001

**MATRIK KESELARASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**

VISI	:Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI"		
Misi 1	: meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi		
Misi 3	: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		
Misi 4	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan		
Tujuan 1	:Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Sasaran 1	: Meningkatnya kinerja pelayanan publik di kecamatan
		Sasaran 2	: Meningkatnya kinerja pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Sasaran 3	: Meningkatnya kinerja pembinaan dan pemberdayaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
		Sasaran 4	: Meningkatnya kinerja pelayanan pada stake holder kemasyarakatan keagamaan, bidang sosial, kepemudaan, kesenian dan kebudayaan
		Sasaran 5	: Meningkatnya kinerja jaseksi pelayanan kepada stake holder dalam administrasi pemerintahan
		Sasaran 6	: Meningkatnya kinerja pelaksanaan administrasi pemerintahan
Tujuan 2	:Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif, dan efisien	Sasaran 7	:Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
		Sasaran 8	:Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
		Sasaran 9	:Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

MATRIK KESELARASAN KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2021

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	URAIAN KEGIATAN	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		(Rp)	
																TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Y	IKU	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada		1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Sub Kegiatan Snertigas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	15 desa dan 5 kelurahan dan aparat terkait	Jumlah Terlaksananya kerjasama antara aparat keamanan dan Kecamatan	Y	30.480.000	
		Y	IKU			2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Aparat 15 Desa/5 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik	Aparat 15 Desa/5 Kelurahan	Jumlah terlaksananya penyuluhan pembinaan dan ketahanan nasional	Y	8.047.300	-
		Y	IKU			3		Kafilah Kecamatan Pelaihari, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Kafilah Kecamatan Pelaihari, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	1. Jumlah buka puasa bersama/safari ramadhan bupati, wakil bupati, pejabat Pemkab dengan masyarakat 2. Jumlah organisasi penerima hibah 3. Jumlah terkirimnya kafilah/official dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	Y	1.200.962.865		

		Y	IKU			4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan, Aparat Desa 15 Desa/5 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	ASN Kecamatan, Aparat Desa 15 Desa/5 Kelurahan	Jumlah Dokumen IKM	Y	13.149.800	-
		Y	IKU			5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Aparat desa / Kelurahan aparat terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Aparat desa / Kelurahan aparat terkait	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Y	25.549.900	
		Y	IKU			6		Aparat desa / masyarakat desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y		Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Aparat desa / masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pameran	Y	42.535.751	
						7		Masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Y	40.954.700	
		Y	IKU			8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Aparat 15 Desa/kelurahan,	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Masyarakat, Aparat 15 Desa/kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Y	7.157.300	
		Y	IKU			9		Masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan, lingkup Kec. Pelaihari, serta stake holder terkait,	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y		Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan, lingkup Kec. Pelaihari, serta stake holder terkait,	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Y	13.439.900	
2	Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran Kecamatan Pelaihari Yang Akuntabel	Y	IKU	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian		10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Y	2.614.590	-
		Y	IKU			11		ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan	Y	67.656.930	
		Y	IKU			12		ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Penyediaan BBM Kendaraan Dinas	Y	18.142.400	

								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Pelaihari	1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman 2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Y	107.972.000		
								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah Tenaga PTT yang dibayar	Y	70.803.328	
								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat				Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air listrik dan internet	Y	30.050.000	
								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat				Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Y	9.442.730	
								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat				Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kecamatan Pelaihari	a. Jumlah belanja jasa jaminan barang milik daerah b. Jumlah pembelian alat pembersih dan bahan c. Jumlah pembuatan panggung dan backdrop kantor	Y	78.654.118	
								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Pelaihari	a. Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 b. Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	Y	36.326.460	
												Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Y	4.450.000		
								ASN Kecamatan Pelaihari	Indeks Kepuasan Masyarakat			Kegiatan Perencanaan, Penanggulangan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang	Y	800.000	
												Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DA, SKPD	Kantor Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen	Y	1.200.000		

